

Judul : Dikaji oleh Wamenag dan Menpan: tentang urgensi pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren
Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Dikaji Oleh Wamenag Dan Menpan RB

Tentang Urgensi Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama akan segera terbentuk. Kabar tersebut datang dari Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii. Wacana pembentukan Ditjen Pesantren ini langsung mendapat beragam respons. Antara lain dari anggota DPR dan akademisi.

Kabar itu disampaikan Romo Syafii usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini. Dia mengatakan bahwa surat permohonan izin prakarsa segera dikirim ke Sekretariat Negara.

"Alhamdulillah, ada kabar baik. Surat permohonan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini, untuk dikirim ke Sekretariat Negara," ujar Romo Syafii, Jumat (17/10/2025).

Dia pun mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Kemenpan RB dalam proses pengusulan pembentukan Ditjen Pesantren. Pasalnya, usul ini

sudah berproses sejak 2019. lalu diusulkan kembali pada 2021, 2023, dan 2024. "Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progres signifikan. Kita sangat apresiasi," ujar ujanmya.

Dia menuturkan, pembentukan Ditjen Pesantren mendesak karena pesantren mengemban mandat undang-undang yang sangat berat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur tiga fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Ketiga fungsi ini bahkan sudah diperankan banyak pesantren sejak sebelum Indonesia merdeka. Pesantren sudah ada sejak abad 15 Masehi," papar Romo Syafii.

Dia menjelaskan, fungsi pendidikan yang diemban pesantren, menurut dia, terus berkembang, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (mahad aliy). Menurut dia, lembaga pendidikan keagamaan

Islam khas Indonesia ini menjadi kawah bagi para jutaan santri dalam mendalami ajaran Islam rahmatan lil 'alamin.

Wamenag pun optimis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren segera terbentuk. Pembentukan Ditjen tersebut diharapkan jadi kado Hari Santri pada 22 Oktober 2025.

"Saya optimis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai, pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah strategis dan bersejarah bagi dunia pesantren di Indonesia. Dia melihat keputusan ini bukan sekadar perubahan struktural di Kementerian Agama, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap jasa dan kontribusi pesantren dalam membangun bangsa.

"Pesantren selama ini menjadi pilar penting dalam membangun karakter bangsa, mencetak ulama,

dan menjaga nilai-nilai kebangsaan," ujar Maman kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (18/10/2025).

Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Khariie memandang, langkah wacana pembentukan Ditjen Pesantren ini sebagai kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Dia menambahkan, pembentukan ini guna menjamin keberlanjutan kebijakan afirmatif bagi pesantren di masa mendatang.

"Ini bukan semata urusan administratif, tapi ini merupakan upaya penataan kelembagaan, agar negara hadir secara lebih sistemik dalam mengawal pesantren sebagai pilar peradaban Islam Nusantara," ujar Tholabi saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Sabtu (18/10/2025).

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Maman Imanulhaq dan Ahmad Tholabi Khariie tentang pembentukan Ditjen Pesantren, berikut wawancaranya.

MAMAN IMANULHAQ
Anggota Komisi VIII DPR

Banyak Kebijakan Yang Tumpang Tindih



Selama ini, pengelolaan pesantren cenderung tersebar di berbagai direktorat dan program yang belum terintegrasi. Banyak kebijakan tumpang tindih.



APA pandangan Anda terhadap wacana pembentukan Ditjen Pesantren di tubuh Kementerian Agama?

Pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah strategis dan bersejarah bagi Indonesia. Selama ini pesantren telah menjadi pilar penting dalam membangun karakter bangsa, mencetak ulama, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Namun, peran besar itu belum dimbangi dengan kebijakan struktural yang memadai.

Dengan adanya Ditjen Pesantren, negara akhirnya memberikan ruang yang lebih proporsional untuk memperkuat ekosistem pesantren secara kelembagaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ini bukan hanya urusan administratif, tetapi bentuk pengakuan terhadap jasa dan kontribusi pesan-

tren dalam perjalanan kebangsaan Indonesia.

Apa persoalan utama yang dihadapi pesantren sehingga perlu dibentuk direktorat khusus?

Selama ini, pengelolaan pesantren cenderung tersebar di berbagai direktorat dan program yang belum terintegrasi. Akibatnya, banyak kebijakan yang tumpang tindih, data yang tidak valid, serta dukungan yang tidak merata antara pesantren besar dan pesantren kecil.

Selain itu?

Masih banyak pesantren yang berjuang sendiri dalam hal pendanaan, pengembangan SDM, dan modernisasi manajemen. Padahal, di tengah perubahan zaman, pesantren

dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Karena itu, pembentukan Ditjen Pesantren menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan adanya lembaga khusus yang fokus pada penguatan kapasitas pesantren secara menyeluruh.

Menurut Anda, langkah ini bisa menjawab tantangan besar yang dihadapi pesantren?

Saya optimis bisa. Ditjen Pesantren akan menjadi ruang koordinasi yang lebih kuat untuk menyinkronkan program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan karakter santri. Dengan kebijakan yang fokus, pemerintah dapat membantu pesantren bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, tapi tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. ■ *note*

PROF AHMAD THOLABI KHARIEE
Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Momentum Upaya Penataan Kelembagaan



Ditjen Pesantren dapat berfungsi sebagai katalis, yang mempercepat integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan inovasi kontemporer.



APA pandangan Anda terkait wacana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama?

Pembentukan Ditjen Pesantren merupakan langkah strategis dan sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Pesantren adalah entitas pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki fungsi ganda. Yaitu sebagai lembaga *afiqah fi al-din* atau pondokan ilmu agama, sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat. Namun selama ini, perhatian struktural terhadap pesantren masih tersebar di beberapa direktorat, sehingga kebijakan yang lahir sering kali parsial.

Menurut Anda, apa dampak positif dari Ditjen Pesantren ini?

Penting untuk menghadirkan satu komando kebijakan yang lebih fokus dan terarah. Munculnya kebijakan yang

lebih terfokus dalam dua ranah strategis. Pertama, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan kemandirian lembaga. Pertama, mutu pendidikan pesantren dapat diperkuat melalui dukungan kurikulum integratif, peningkatan kapasitas guru, dan penguatan riset berbasis tradisi pesantren. Kedua, kemandirian ekonomi pesantren bisa diperkuat lewat fasilitasi akses pendanaan, inkubasi wirasaba santri, dan penguatan jejaring industri halal.

Bagaimana pesantren melakukan hal tersebut selama ini?

Banyak pesantren yang telah bergerak maju secara mandiri, namun belum mendapat dukungan kebijakan yang proporsional. Ditjen Pesantren dapat berfungsi sebagai katalis, yang mempercepat integrasi antara tradisi keilmuan klasik dan inovasi kontemporer. Sehingga pesantren tidak hanya

kuat dalam spiritualitas, tetapi juga berdaya secara sosial dan ekonomi.

Apakah ini tidak akan menambah beban birokrasi bagi Kemenag?

Bisa diantisipasi dengan desain kelembagaan yang efisien dan berbasis kebutuhan lapangan. Yang penting bukan sekadar menambah struktur, tetapi menata ulang orientasi birokrasi agar lebih fungsional dan melayani. Justru yang perlu ditekankan adalah bagaimana Ditjen Pesantren hadir sebagai regulator yang memerdekan, bukan membatasi. Artinya, Ditjen harus berperan memfasilitasi dan mengakselerasi, bukan mengontrol secara berlebihan. Jika pendekatan yang digunakan adalah *empowering governance*, bukan *bureaucratic control*, maka Ditjen Pesantren akan menjadi jembatan kemajuan, bukan beban tambahan. ■ *note*